



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 April 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD HERINDRA
2. Jabatan : WAKIL MENTERI PERTAHANAN
3. NHK : 423384

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 16.020.988.791

1. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 4.100.315.658
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.945.123.800
3. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.900.549.333
4. Tanah dan Bangunan Seluas 948 m2/948 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.075.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 661.500.000

1. MOBIL, TOYOYA ALPHARD SC 2.5L AT Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 661.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 344.765.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.855.989.016

F. HARTA LAINNYA Rp. 580.473.538

Sub Total Rp. 24.463.716.345

III. HUTANG Rp. 1.000.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 23.463.716.345

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DONNY ERMAWAN T.**
2. Jabatan : **SEKRETARIS JENDERAL**
3. NHK : **252042**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 12.403.600.000

1. Tanah Seluas 2240 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 1852 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 658 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 202 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 833 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. Tanah Seluas 1369 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
7. Tanah Seluas 1885 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
8. Tanah Seluas 2720 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah Seluas 2720 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
10. Tanah Seluas 7191 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 395 m2/400 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
12. Tanah dan Bangunan Seluas 617 m2/187 m2 di KAB / KOTA



SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m²/195 m² di KAB / KOTA

BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

14. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m²/400 m² di KAB / KOTA

BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 619.200.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/300 m² di KAB / KOTA

BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 464.400.000

16. Tanah Seluas 20430 m² di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 85.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 550.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 2.035.768.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.568.849.511

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 16.643.217.511

III. HUTANG Rp. 670.328.979

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 15.972.888.532

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI PRIJONO**
2. Jabatan : **INSPEKTUR JENDERAL**
3. NHK : **659393**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.320.000.000

1. Tanah Seluas 1062 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/72 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 1216 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN
Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 436 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN
Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 1300 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN
Rp. 190.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 781 m2/350 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/187 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/200 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 248.000.000



1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
190.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
3. MOBIL, JEEP WILLYS Tahun 1952, HASIL SENDIRI Rp.
55.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	301.340.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.478.661.374
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	10.348.001.374
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.348.001.374

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 September 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS ISROK MIKROJ
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 914303

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 200.000.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 722.500.000

1. MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
3. MOBIL, NISSAN TERRA 2,5 VL AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 378.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 70.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.884.815.308

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 57.365.028

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.934.680.336

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.934.680.336



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : YUDI ABRIMANTYO
- Jabatan : KEPALA BADAN
- NHK : 524026

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.881.288.326

- Tanah Seluas 257 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
- Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 650.000.000
- Bangunan Seluas 26.58 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL
SENDIRI Rp. 150.558.326
- Bangunan Seluas 37.2 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR
, HASIL SENDIRI Rp. 450.730.000
- Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 680.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 240.500.000

- MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
240.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 605.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.324.216.537**F. HARTA LAINNYA** Rp. 210.000.000

Sub Total Rp. 6.261.004.863

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 6.261.004.863

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUPO DWI DIANTARA**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **801629**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.286.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192.37 m²/196.89 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HADIAH Rp. 1.515.000.000
2. Tanah Seluas 1624 m² di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 163.100.000
3. Tanah Seluas 72 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 82.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/127 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.020.000.000
5. Tanah Seluas 698 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 141.000.000
6. Tanah Seluas 800 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m²/40 m² di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 561.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000



4. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp.	120.000.000
5. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2023, HADIAH	Rp.	25.000.000
6. LAINNYA, SEPEDA LISTRIK GT GE Tahun 2023, HASIL SENDIRI	Rp.	3.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	23.640.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.435.831.041
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	6.307.571.041
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.307.571.041

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : BADAN SARANA PERTAHANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERU SUDARMINTO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 656248

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 657.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N MAX 2DP-R A/T Tahun 2018, HADIAH Rp. 12.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 120.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.738.302.430

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 5.015.302.430

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.015.302.430

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Mei 2023/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : PUSAT REHABILITAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DANIEL LUMADYO WARTOADI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 906812

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.448.400.000

1. Tanah Seluas 84 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 249.000.000
2. Tanah Seluas 63 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/138 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 628.890.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 510.510.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 975.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI OUTLAND SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 216.000.000
2. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER VX Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA G DIESEL Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERTAHAPAN

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 909.722.665

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.333.122.665



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.333.122.665

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAINUL ARIFIN
2. Jabatan : STAF AHLI KHUSUS BIDANG KEAMANAN
3. NHK : 635017

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 22.396.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 5.700.000.000
3. Bangunan Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 11.750.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 58 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000
6. Tanah Seluas 948 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 106.000.000
7. Tanah Seluas 1048 m2 di KAB / KOTA LOMBOK UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 985.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VELFIRE Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 585.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XFORCE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 260.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 26.948.020.976



F. HARTA LAINNYA	Rp.	7.715.000.000
Sub Total	Rp.	58.304.020.976
III. HUTANG	Rp.	1.151.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	57.152.620.976

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : BADAN SARANA PERTAHANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSUF JAUHARI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 551292

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.184.000.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 336.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.596.000.000
3. Tanah Seluas 398 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 178.500.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 73.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 315.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.887.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.901.933.557

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 8.287.933.557

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.287.933.557

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 April 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : PUSAT DATA DAN INFORMASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIONARDO
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 918537

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 4.779.491.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.722.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 526.491.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 81.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 485.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 485.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 13.000.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 400.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.677.491.000



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.677.491.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.